

Dana desa telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN. Pasal 1, ayat kedua dinyatakan: Dana Desa adalah Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Dengan disahkannya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa diberikan kesempatan yang besar untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri serta pelaksanaan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa. Selain itu pemerintah desa diharapkan untuk lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya alam yang dimiliki, termasuk di dalamnya pengelolaan keuangan dan kekayaan milik desa. Keberhasilan pengelolaan ADD sangat tergantung dari berbagai faktor antara lain kesiapan aparat pemerintah desa sebagai ujung tombak pelaksanaan di lapangan, optimalisasi peningkatan implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan di tingkat desa, sehingga perlu sistem pertanggungjawaban pengelolaan ADD yang benar-benar dapat memenuhi prinsip akuntabilitas keuangan daerah.

Buku ini membahas tentang pelaksanaan pengelolaan alokasi dana desa di Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten Pelalawan. Selain itu buku ini menjelaskan masalah-masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan dana desa, hambatan-hambatan dalam pelaksanaan dana desa dan upaya partisipasi masyarakat dalam mendukung pelaksanaan keuangan desa.

Dalam penulisan buku ini kami menyadari masih banyak terdapat kekurangan dan kelemahan yang disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki. Oleh karena itu, penulis dengan senang hati menerima kritikan dan saran dari semua pihak guna kesempurnaan penulisan selanjutnya. Penulis ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada pihak yang telah memberikan bimbingan dan arahan serta dukungan.

KATA PENGANTAR

Pekanbaru, 15 Oktober 2018

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
RINGKASAN	v



BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
BAB 2 PERUNDANG-UNDANGAN DAN TAHAPAN DANA DESA...	5
2.1. Tahap Perencanaan Alokasi Dana Desa.....	7
2.2. Tahap Pelaksanaan Alokasi Dana Desa.....	8
2.3. Tahap Pelaporan Alokasi dana Desa.....	9
2.4. Tahap Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa	10
BAB 3 AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA DI PELALAWAN	11
BAB 4 PENDAMPINGAN AKUNTANSI DANA DESA DI KABUPATEN PELALAWAN.....	14
4.1 Pendampingan Akuntansi Dana Desa.....	17
4.2 Membuat Model, Kebijakan dan Strategi	21
4.3 Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Pesisir.....	22
4.4 Bentuk Penguatan Masyarakat Wilayah Pesisir.....	25
4.5 Bentuk Akuntabilitas Penggunaan Dana Desa.....	27
BAB 5 AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA DI KABUPATEN BENGKALIS.....	35
5.1. Pendampingan Akuntansi Dana Desa Secara Akuntabel	41
5.2. Membuat Model, Kebijakan dan Strategi Dana Desa	47
5.3. Pemberdayaan Masyarakat Pesisir terhadap Dana Desa.....	48
5.4. Bentuk Penguatan Masyarakat Pesisir terhadap Dana Desa.....	52
5.5. Bentuk Akuntabilitas Penggunaan Dana Desa.....	57
BAB 6 PENUTUP.....	65
DAFTAR PUSTAKA.....	67

DAFTAR TABEL

Alokasi Dana Desa dari APBN 2016	
Tiap Kabupaten di Provinsi Riau	3
Pembagian Alokasi Dana Desa di Wilayah	
Kabupaten Bengkalis	35



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Tahapan Pengelolaan Dana Desa.....	7
Gambar 4.1 Wawancara dengan Sekretaris Desa.....	13
Gambar 4.2 Pelatihan Pendampingan Akuntansi Dana Desa di Kabupaten Pelalawan.....	17
Gambar 4.3 Pelatihan Akuntansi Dana Desa di Kabupaten Pelalawan.....	18
Gambar 4.4 Peserta Pelatihan Akuntansi Dana Desa di Kabupaten Pelalawan.....	18
Gambar 4.5 Peserta dan Narasumber Pelatihan Akuntansi Dana Desa di Kabupaten Pelalawan.....	20
Gambar 5.1 Perangkat Desa di Kabupaten Bengkalis.....	36
Gambar 5.2 Kantor Desa Kelapa Pati di Kabupaten Bengkalis.....	38
Gambar 5.3 Kantor Desa Senggoro di Kabupaten Bengkalis.....	38
Gambar 5.4 Kantor Desa Wonosari di Kabupaten Bengkalis.....	40
Gambar 5.5 Kantor Desa Air Putih di Kabupaten Bengkalis.....	41
Gambar 5.6 Kantor Desa Kuala Alam di Kabupaten Bengkalis.....	42
Gambar 5.7 Kantor Desa Kelebuk di Kabupaten Bengkalis.....	43
Gambar 5.8 Kantor Desa Prapat Tunggal di Kabupaten Bengkalis.....	44
Gambar 5.9 Kantor Desa Pangkalan Batang di Kabupaten Bengkalis.....	45
Gambar 5.10 Kantor Desa Pedekik di Kabupaten Bengkalis.....	47

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis atau tanpa izin:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penerbitan atau jurnal dan untuk tujuan lainnya;
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



RINGKASAN

Salah satu permasalahan utama pembangunan di Indonesia adalah pemerataan. Pemerintah memperhatikan pembangunan desa dengan menyediakan dana pembangunan desa. Dana Desa adalah Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Pengelolaan keuangan desa berupa seluruh rangkaian kegiatan yang dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan hingga pertanggungjawaban yang dilaksanakan dalam satu tahun anggaran, terhitung mulai 1 Januari sampai 31 Desember.

Dana desa digunakan untuk mendanai keseluruhan kewenangan desa dengan prioritas untuk mendukung program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Hasil menunjukkan, masih terdapat beberapa persoalan riil dan kontekstual terkait dengan pengelolaan dana desa yang harus diselesaikan oleh pemerintah. Permasalahan-permasalahan yang dimaksud adalah: 1) Desa belum memiliki pemahaman terkait dengan BUMDes, 2) Kapasitas perangkat desa. Dalam mengembangkan dan mengoptimalkan pemanfaatan potensi desa belum merata, dimana baru ada sekitar 1000 BUMDes yang ada dan masih ada sekitar 73.093 desa lainnya yang belum mempunyai BUMDes, 3) Belum kuatnya komitmen terhadap desa, fungsi fasilitasi dan pembinaan terhadap desa, dan masih belum berjalan di semua kabupaten, dan 4) Pemerintah pusat kadang menyederhanakan persoalan sebatas dana desa, sehingga di lapangan banyak menimbulkan ketidakpastian, terutama terkait dengan posisi dana desa dalam Anggaran Pendapatan Belanja Desa atau APBDes.

Penelitian pengelolaan Alokasi Dana Desa di Provinsi Riau ini difokuskan pada penerapan prinsip akuntabilitas yang dilakukan Tim Pelaksana yang dibentuk di masing-masing desa. Penerapan prinsip akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa ini dimulai dari tahap memahami perencanaan keuangan desa, memahami pelaksanaan semua kegiatan, penatausahaan keuangan desa, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa sehingga pengelolaan Alokasi Dana Desa diharapkan dapat dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Provinsi Riau, pengelolaan keuangan desa, khususnya untuk pengelolaan ADD belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Secara umum pengelola tingkat Desa belum menyelenggarakan administrasi keuangan desa dengan baik dan benar. Keberhasilan pengelolaan ADD sangat dipengaruhi dari berbagai faktor antara lain kesiapan aparat pemerintah desa sebagai ujung tombak pelaksanaan di lapangan, optimalisasi peningkatan implementasi SAP di tingkat desa, sehingga perlu sistem pertanggungjawaban pengelolaan ADD yang benar-benar dapat memenuhi prinsip akuntabilitas keuangan daerah yang berdasarkan UU No. 6 tahun 2014 tentang desa diikuti dengan PP 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan dan Permendagri tahun 2016 tentang pedoman pengelolaan kekayaan desa.





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa izin Universitas Riau.



Tentang Penulis

Dr. Enni Savitri, SE., MM., Ak., CA lahir di Pekanbaru tanggal 15 Oktober 1973. Setelah tamat dari SMAN 1 Pekanbaru tahun 1993, melanjutkan pendidikan Pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Riau dan memperoleh Sarjana Ekonomi tahun 1998. Dikaruniai dua orang anak yaitu Putri Nabila Musfi dan Raihan Abdul Musfi.

Tahun 2001-2004 melanjutkan pendidikan ke Program Pasca Sarjana Magister Manajemen Universitas Riau pada bidang Manajemen Keuangan. Tahun 2006-2012, kembali melanjutkan studi di Pasca Sarjana Universitas Brawijaya dengan konsentrasi Kajian Manajemen Keuangan, dan berhasil memperoleh gelar Doktor.

Sejak tahun 2012 telah aktif melakukan penelitian, mengikuti seminar dan menulis pada jurnal penelitian. Selain aktif sebagai Dosen Tetap Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Riau Program S1 Akuntansi, Program Magister Akuntansi dan Program Magister Manajemen Universitas Riau. Penulis juga aktif di pusat kajian badan Pengkajian dan Penelitian Universitas Riau.

Penulis memiliki 5 hasil karya berupa buku dengan judul:

Peranan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir dan Modal Sosial dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Pesisir di Kabupaten Indragiri Hilir dan Bengkalis.

Peran Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir dan Modal Sosial dalam Meningkatkan Kesejahteraan di Kabupaten Meranti dan Rokan Hilir.

Konservatisme Akuntansi Cara Pengukuran, Tinjauan Empiris dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya.

Penganggaran Perusahaan

Penganggaran Perusahaan II